

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan yaitu: Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, dan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi Balitbangda untuk menjalankan tugas pokok tersebut, yaitu rendahnya kompetensi SDM, khususnya Peneliti. Disamping itu jumlah SDM Peneliti belum seluruhnya memenuhi kompetensi bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan, yaitu Bidang: 1) Pendidikan, 2) Pemerintahan, 3) Infrastruktur, dan 4) Seni, Budaya dan Pariwisata, SDM Peneliti yang terbatas akan berdampak pada akselerasi penanganan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peningkatan kompetensi peneliti diharapkan dapat ditingkatkan melalui diklat teknis, seminar, dan workshop. Selain itu peneliti dapat berkolaborasi dalam kegiatan penelitian bermitra dengan Perguruan Tinggi, Lemlit dan OPD terkait.

Selain permasalahan terbatasnya SDM Peneliti ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1. Data base sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan belum seluruhnya tersedia**
- 2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD, antar daerah, swasta dan masyarakat**

Hubungan kerja antara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumsel dengan OPD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan penelitian dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral. Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten/Kota. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat: 1) hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah, 2) belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota, dan 3) masih rendahnya implementasi inovasi Iptek bagi pembangunan di daerah

- 3. Pembinaan Lembaga Litbang di Kab/kota tidak optimal**

Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum memiliki lembaga litbang daerah padahal lembaga Litbang daerah memiliki peran sentral dalam menggerakkan penguatan inovasi daerah. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2011, kelitbangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama terbagi lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan

pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Balitbangda menjadi unsur perangkat daerah yang secara strategis mengawal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah. Pada pelaksanaannya pembinaan terhadap lembaga litbang daerah memiliki permasalahan diantaranya belum adanya tenaga peneliti, mutasi pegawai yang relatif cepat, dan kurangnya sarana dan prasarana kelitbangan.

4. Budaya Inovasi di kalangan masyarakat dan akademisi, serta pelaku usaha masih rendah

Pengembangan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa. Pemerintah telah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk lebih maksimal didalam berinovasi maupun berkarya. Bahkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan bahwa inventor atau peneliti adalah sekaligus pemegang paten. Serta, berhak mendapatkan imbalan. Namun hal tersebut tidak serta merta menumbuhkan budaya inovasi di kalangan masyarakat ataupun dunia usaha.

5. Kualitas dan Kuantitas Hasil Penelitian masih rendah

Hasil penelitian bila dilihat dari segi kuantitas mengalami peningkatan, namun tidak terlalu significant, sementara kualitas jurnal ilmiah hasil peneliti dan akademisi di Provinsi Sumatera Selatan dinilai masih rendah. Hingga saat ini, mayoritas publikasi ilmiah asal Sumatera Selatan hanya terpublikasi di Scopus, atau jurnal internasional tingkat menengah. Hasil Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan sudah banyak yang terpublikasi hanya saja tidak disertai dengan sitasinya, itu tandanya kualitasnya masih belum maksimal/rendah.

6. Hasil – hasil Penelitian belum dimanfaatkan dengan optimal

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sumatera Selatan yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan Balitbangda, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Sumsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar: a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan. Namun, berdasarkan data Balitbangda Prov. Sumsel pemanfaatan hasil kelitbangan belum Optimal baik dari OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, dunia usaha maupun masyarakat. Data tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kelitbangan baru mencapai 30 - 50 %.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**A. Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

adalah: **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA** Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut: Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan. Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi2: Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang

didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Prov. Sumsel, Balitbangd turut bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Balitbangda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarasanya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas kinerja penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Balitbangda berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Pada Misi pertama, yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu dengan sasaran Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) 2. Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) 3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya produksi/produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan) 4. Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) 5. Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi).

Untuk Sasaran Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) ditempuh dengan strategi ; 1) Menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata dan industri pengolahan;2) Mempercepat berfungsinya KEK di Sumatera Selatan;3) Meningkatkan kerjasama unsur Akademisi, Bisnis, Government,Legislatif;4) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah untuk pembangunan;5) Mengoptimalkan ekonomi produktif berbasis kearifan lokal; 6) Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung oleh sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik;7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di sektor jasa dan IKM;8) Meningkatkan kerjasama program technopreneurship;9) Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR);10) Meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Untuk Sasaran Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) ditempuh dengan strategi: 1) Mengoptimalkan proses perizinan untuk investasi; 2) Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata;3) Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan

memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal; 4) Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan; 5) Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar tradisional modern (PTM); 6) Meningkatkan daya saing produk IKM; 7) Mendorong kondisi yang kondusif bagi investasi; 8) Mendorong tersedianya infrastruktur untuk mendukung iklim investasi; 9) Meningkatkan kualitas SDM IKM; 10) Memfasilitasi standisasi industri; 10) Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri lainnya.

Untuk Sasaran ketiga terakhir, yaitu Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya produksi/produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan) dilakukan melalui strategi: 1) Mengembangkan kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dan memperpendek rantai pasar; 2) Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan; 3) Monitoring dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan; 4) Riset berbasis kebutuhan; 5) Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi; 6) Meningkatkan kualitas SDM Peneliti; 7) Melakukan koordinasi dengan pembuat kebijakan dan pelakubisnis; 8) Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi; 9) Inventarisasi permasalahan yang membutuhkan litbang dan inovasi; 10) Mengupayakan pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan agar nilai jual nelayan lebih tinggi; 11) Meningkatkan akses petani terhadap saprodi berkualitas dan terjangkau; 12) Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa; 13) Menjamin ketersediaan air di lahan irigasi dan non irigasi; 14) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan prasarana di dalam dan keluar sentra produksi komoditi pangan; 15) Mencetak sawah baru untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan; 16) Peningkatan Kesehatan Ternak Terhadap Serangan Penyakit; 17) Pemantapan Ketersediaan Pangan, Kelembagaan Distribusi Pangan; 18) Masyarakat dan Gerakan

Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar; 19) Melakukan Peremajaan Tanaman Yang Sudah Tua atau kurang produktif, intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan sarana panen, peningkatan kemampuan SDM petani dalam Budidaya Tanaman, penanggulangan OPT, meningkatkan harga jual komoditas.

Untuk Sasaran Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) dilakukan dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan social, peningkatan advokasi dan rehabilitasi social, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social. Dan sasaran terakhir Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi) dapat dilakukan strategi; Dalam hal pencapaian misi pertama, sub bidang Subbidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah bidang Sosial dan Kependudukan dan sub bidang Ekonomi dibawah bidang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mengemban amanah untuk berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Dari uraian diatas dapat ditelaah beberapa permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, antara lain :

- 1) Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung penelitian/kajian.
- 2) Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi/fungsional peneliti.
- 3) Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2014–2019 adalah “Iptek Untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Peradaban”.

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.
- 2) Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia.

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2014-2019 memberikan gambaran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai “*engine of tomorrow*” yang mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Iptek nasional seharusnya sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah system yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu system yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan Iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan Iptek ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, maka program pembangunan Iptek kedepan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (SisnasIptek).

Sistem Inovasi Nasional adalah sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (*technology supply chain*) yang mengaitkan antara institusi publik Pemasok teknologi dan sector swasta pengguna teknologi dalam Suatu wilayah nasional (SINas) atau daerah (SIDa) yang berinteraksi

secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

SINas dikembangkan dalam rangka menjembatani antara sisi kebutuhan iptek dalam masyarakat dengan stakeholders yang menawarkan berbagai kreatifitas dan inovasi pengembangan iptek yang selama ini sering dianggap menjadi *missinglink* dalam penerapan iptek. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam Penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi penelitian pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, sebagai institusi penelitian di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Balitbang Depdagri, sebagai institusi penelitian di tingkat pusat.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Balitbang Depdagri adalah:

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan berbagai permasalahan timbul.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pelayanan OPD, yaitu :

a. Faktor Penghambat:

- 1) Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangda yang masih terbatas. Masalah ini sangat crucial, karena SDM yang ada sangat kurang untuk menunjang kegiatan litbang dan inovasi, masih banyak staf yang latar pendidikannya tidak sesuai Tupoksi litbang,

ditambah lagi dengan banyaknya SDM yang mendekati masa pensiun, tetapi tidak ada formasi untuk pengangkatan CPNS baru.

- 2) Belum adanya SOP Penunjang inovasi untuk Inkubator Teknologi dan Bisnis, dan Pasca Inovasi
- 3) Motivasi dan minat skill peneliti (SDM)
- 4) Sinergi ABG (Akademisi, Bisnis dan Government)
- 5) Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program;
- 6) Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah.
- 7) Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh OPD diluar Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu;

b. Faktor Pendorong

- 1) Tupoksi Balitbangda sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan Inovasi multisektor
- 2) Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja
- 3) Kerjasama dengan lintas sektoral: Perguruan Tinggi, LPK dan LPNK
- 4) Sarana dan Prasarana Pendukung Inovasi (Inkubator Teknologi dan Bisnis, Sentra HKI, BIC, Website)
- 5) Program Kerja Desa Inovasi untuk meningkatkan income masyarakat (Roadmap dan Masterplan SIDA Sumsel yang mendukung pelaksanaan kegiatan litbang dan Inovasi)
- 6) Sumber daya alam yang mendukung, yang harus dicari teknologinya, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut dan dapat berdaya saing dengan produk yang sama.

- 7) Peraturan Bersama Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Meristek Nomor:36 Tahun 2012 (Penguatan Fungsi Balitbangnovda sebagai koordinator dalam Sistem Inovasi Daerah)
- 8) Adanya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Selatan melalui Agenda Riset Daerah (ARD) tahun 2018-2023 yang memberikan masukan kepada Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kegiatan maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan atau Kepala Daerah.
- 9) Masukan ide/gagasan dari Staff Tenaga Ahli Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan kebijakan – kebijakan strategis daerah.
- 10) Terbentuknya kerjasama jaringan penelitian pada OPD yang membidangi kelitbangan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil Litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.
- 3) Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang.
- 4) Terwujudnya peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

- 1) Menata sistem penentuan arah kebijakan dan rencana aksi Litbang yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
- 2) Meningkatkan aktivitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil Litbang sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan jejaring kerjasama dan koordinasi kegiatan Kelitbangan.
- 3) Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil-hasil Litbang.
- 4) Mengusulkan penambahan kuantitas tenaga fungsional peneliti.

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

BALITBANGDA PROVINSI SUMSEL				BALITBANG KEMENDAGRI				KEMENRISTEK DIKTI			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	1. Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh: - OPD Provinsi – Kab/Kota	Program Penelitian Pemerintahan dan Masyarakatan	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri	Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan	Prosentase laporan kelitbangan dengan kategori "baik" atas penilaian TPM	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	Peningkatan relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun	Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi
			Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							Jumlah Pusat Unggulan Iptek	Program Pengembangan PUI
		2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didisemin	Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan	Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi	Prosentase hasil kelitbangan yang masuk dalam jurnal ilmiah	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah			Meningkatnya kapasitas inovasi	Jumlah publikasi internasional	Program Penguatan Riset dan Pengembangan

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

						Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum				Jumlah prototipe R & D (TRL sd. 6)	Program Penguatan Inovasi
						Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna	
Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Sumsel	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah Sumsel	1. Persentase OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah									
		2. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah				Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur				

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, SDIG's dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel bawah ini Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.1 Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Sumatera

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
I.	Rencana pusat permukiman / Struktur Perkotaan			
I.1	Pemantapan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Palembang	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.2	Pengembangan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kayuagung 2. Prabumulih 3. Baturaja 4. Muara Enim 5. Lahat 6. Lubuk Linggau 7. Sekayu	Pemerintah, OPD Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.3	Peningkatan status menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKW)	1. Indralaya 2. Martapura 3. Sungsang 4. Pagar Alam	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/ Kota	Tahun 2017 – 2018

I.4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Lilin 2. Tebing Tinggi 3. Muara Beliti 4. Muara Dua 5. Pangkalan Balai 6. Gumawang 7. Tugumulyo 8. Talang Ubi 9. Peninjauan 10. Muara Rupit 11. Bayung Lencir 12. Tanjung Raja 13. Muara Lakitan 14. Pengadonan 	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/ Kota	Tahun 2017 – 2020
II.	Rencana jaringan transportasi			
II.1	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat			
II.1.1	Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Barat 2. Lintas Tengah 3. Palembang-PrabumulihMuara Enim 	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 20162036
II.1.2	Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkar Palembang 2. Palembang-Tanjung Api- 3. Api 4. Tugumulyo-Gumawang- 5. Martapura 6. Sekayu-Babat toman-Muaralakitan-Muara Beliti 7. Sekayu-Talangubi-Gunung 8. Megang 9. Prabumulih-Karangagung- 10. Baturaja 11. Tebingtinggi - PendopoMuarapina 	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 20162036

		ng-Pagar Alam-		
--	--	----------------	--	--

3.4.1. 1 Kebijakan Umum Penataan Ruang

Adapun tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi berfungsi sebagai:

- 1) Dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi
- 2) dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah provinsi
- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi
- 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi
 - a) tujuan penataan ruang wilayah Provinsi
 - b) karakteristik wilayah Provinsi
 - c) kapasitas sumber daya wilayah Provinsi dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
 - d) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah bersangkutan;

- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu penelitian pada wilayah provinsi bersangkutan;
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.41.2 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan kebijakan di atas, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang agar penataan ruang wilayah Provinsi dapat tercapai.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- 1) Menciptakan keterpaduan sistim perkotaan
- 2) Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendalian dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi;
- 3) Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

3.41.3 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi :

- a) Rencana sistem perkotaan
- b) Rencana sistem jaringan transportasi
- c) Rencana sistem energi dan kelistrikan
- d) Rencana sistem telekomunikasi
- e) Rencana sistem sumber daya air
- f) Rencana sistem jaringan lainnya

3.4.2 Telaah SDGs

Analisa permasalahan dan Isu Strategis capaian SDGs Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat gambaran pencapaian Sumatera Selatan (pada Bab II) yang telah ditagging dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan melakukan analisa permasalahan dengan melakukan *cascading* per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan yang akan menjadi acuan pada RPJMD Sumatera Selatan Periode 2018-2023. Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan adalah indikator utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Goal 1 yang angkanya masih di bawah nasional.

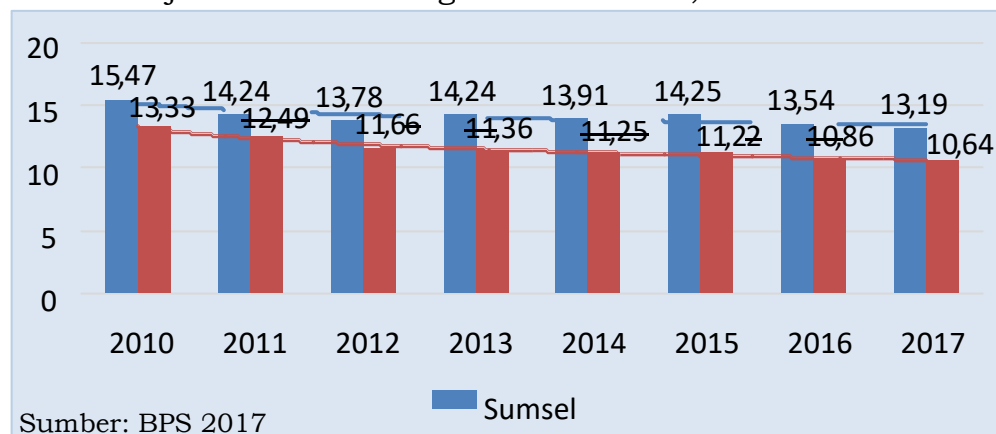
Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2010 hingga 2017. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 15,47% pada tahun 2010 menjadi 13,19% pada tahun 2017 (angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,125 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 1,086 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin hanya menurun 5,500 jiwa/tahun. Pada Maret 2018 angka kemiskinan Sumatera Selatan turun lagi menjadi 12,80%.

Penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata

laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 2,28%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 1,23%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,33% terjadi pada tahun 2014. Dalam kurun waktu 7 tahun yakni dari tahun 2010 hingga 2017, persentase kemiskinan bahkan pernah juga mengalami peningkatan di tahun 2013 dan 2015. Meskipun persentase kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan, namun angka tersebut masih berada di atas tren kemiskinan nasional.

Gambar 3.1

Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2010-2017



Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah. Secara umum, konsumsi per kapita Sumatera Selatan tahun 2015 yaitu sebesar 731,429 rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 557,869 rupiah. Dalam kurun waktu selama 4 tahun dari 2011 hingga 2015, terjadi peningkatan laju pertumbuhan konsumsi perkapita masyarakat Sumatera Selatan sebesar 23%.Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi

pada kelompok masyarakat miskin. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok masyarakat miskin mengalami peningkatan.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan Tahun 2016-2018, dimana telah dilakukan telaah terhadap kemiskinan Sumatera Selatan, maka isu strategis Kemiskinan Sumatera Selatan terkait dengan akar masalah kemiskinan di Sumatera Selatan. Akar masalah ini yang menjadi isu strategis yang memerlukan upaya yang serius dalam penanganannya, yaitu:

1. Peningkatan Perlindungan sosial
2. Peningkatan Akses masyarakat terhadap sumberdaya tidak bias gender
3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin,
4. Peningkatan mobilisasi sumber daya,
5. Peningkatan aset dan
6. Peningkatan daya beli masyarakat.

3.4.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencanadan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan sudah mengacu pada KLHS. Seluruh dokumen penelitian yang terbentuk mengisyaratkan kepada para penelitian Balitbang, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah(RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penelitian pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis padalingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.

Balitbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penelitian pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan penelitian pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses penelitian pengembangan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Balitbangda adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penelitianan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam penelitian pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan penelitianan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Balitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penelitianan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan penelitian partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas penelitianan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM penelitian, memantapkan kelembagaan penelitianan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitianan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitianan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitianan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pengembangan daerah.

5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.
9. Tersedianya ketatalaksanaan penelitian pengembangan daerah.

3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

3.5.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kekuatan yang dimiliki Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Memiliki SDM Fungsional dan Struktural

2. Memiliki sarana prasarana yang mendukung (Inkubator, STP, KRS, Sentra HKI)
3. Telah ada kerjasama atau kemitraan (lemlit, K/L, BUMD dll)
4. Adanya lembaga pendukung (Forum Inkubator, Jejaring intertek, Asosiasi Peneliti, DRD, dll)
5. Tersedia media publikasi (Web, Facebook, E-Jurnal)
6. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat
7. Memiliki SOP
8. Memiliki pengalaman baik dalam penerapan hasil litbang maupun pengembangan Purwarupa

Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kelemahan yang miliki Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM
2. Keterlibatan Peneliti dalam jejaring keg. Penelitian di luar OPD masih rendah
3. Belum ada tim internal pengendali mutu kelitbangan
4. Koordinasi program/kegiatan lintas OPD maupun internal belum optimal
5. Publikasi hasil penelitian balitbangda belum optimal
6. Manajemen database kelitbangan belum optimal
7. Implementasi hasil litbang menjadi *policy brief* belum dilaksanakan
8. Transfer teknologi ke pengguna dan masyarakat masih rendah

3.5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat Peluang yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung kelitbangan

2. Adanya Revolusi Industri 4.0
3. Banyaknya PTN/PTS dan Lemlit yang ada di Sumsel
4. Kebutuhan akan data penelitian yang meningkat
5. Perubahan bonus demografi
6. Tersedianya Dana Insentif (Pengembangan SDM, Publikasi, Purwarupa, Kelembagaan Litbang, Penelitian)
7. Tersedianya Hasil riset PT/lemlit
8. Tersedianya IKM/UKM/ Wirausaha pemula

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat Tantangan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Budaya ego sektoral relatif masih tinggi
2. Rendahnya motivasi/ keinginan IKM/UKM/ wirausaha pemula untuk maju dan berkembang
3. Tingginya jumlah dan varian produk import
4. Mindset Inovatif belum merata
5. Belum semua peneliti siap mentransfer invensinya
6. Pelayanan publik harus cepat dan memuaskan
7. Respon pasar cepat berubah
8. Dinamika kemajuan Teknologi yang semakin cepat serta perubahan iklim Global yang extreme

3.5.1.3 Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.

a. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas Penelitian dan pengembangan.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian dan pengembangan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Balitbang yang cukup strategis.

b. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi Masyarakat
2. Mengoptimalkan peran Balitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.
3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

c. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk penelitianan.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

TABEL 3.3 ANALISA SWOT BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki SDM Fungsional dan Struktural Memiliki sarana prasarana yang mendukung (Inkubator, STP, KRS, Sentra HKI Telah ada kerjasama atau kemitraan (lemlit, K/L, BUMD dll) Adanya lembaga pendukung (Forum Inkubator, Jejaring intertek, Asosiasi Peneliti, DRD, dll) Tersedia media publikasi (Web, Facebook, E-Jurnal) Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat Memiliki SOP Memiliki pengalaman baik dalam penerapan hasil litbang maupun pengembangan Purwarupa 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan Kuantitas SDM Keterlibatan Peneliti dalam jejaring keg. Penelitian di luar OPD masih rendah Belum ada tim internal pengendali mutu kelitbang Koordinasi program/kegiatan lintas OPD maupun internal belum optimal Publikasi hasil penelitian balitbangda belum optimal Manajemen database kelitbang belum optimal Implementasi hasil litbang menjadi <i>policy brief</i> belum dilaksanakan Transfer teknologi ke pengguna dan masyarakat masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung kelitbang Adanya Revolusi Industri 4.0 Banyaknya PTN/PTS dan Lemlit yang ada di Sumsel Kebutuhan akan data penelitian yang meningkat Perubahan bonus demografi Tersedianya Dana Insentif (Pengembangan SDM, Publikasi, Purwarupa, Kelembagaan Litbang, Penelitian) Tersedianya Hasil riset PT/lemlit Tersedianya IKM/UKM/ Wirausaha pemula 	<ol style="list-style-type: none"> Budaya ego sektoral relatif masih tinggi Rendahnya motivasi/ keinginan IKM/UKM/ wirausaha pemula untuk maju dan berkembang Tingginya jumlah dan varian produk import Mindset Inovatif belum merata Belum semua peneliti siap mentransfer invensinya Pelayanan publik harus cepat dan memuaskan Respon pasar cepat berubah Dinamika kemajuan Teknologi yang semakin cepat serta perubahan iklim Global yang extreme

3.5.1.4 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode *professional judgement* maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan Pengembangan daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian dan pengembangan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Balitbangda yang cukup strategis.
5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
6. Mengoptimalkan peran Balitbangda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.
7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi Informasi

11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .
15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk- produk penelitian.
16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

3.5.2. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, koordinasi dan kerjasama.

FPK III Meningkatkan kualitas penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

FPK IV Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

3.5.4 Penentuan isu – isu strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis, ada beberapa faktor yang ditinjau, yaitu apakah isu tersebut mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD, apakah merupakan tanggung jawab OPD, memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, kemungkinan mudah untuk ditangani, dan merupakan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.4 Penentuan Kriteria Berdasarkan Bobot Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap Pencapaian sasaran RenstraLembaga	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
T o t a l		100

Berdasarkan Tabel pembobotan diatas dihubungkan dengan Isu strategis OPD, maka didapatkan hasil perhitungan seperti dibawah ini :

Tabel 12. Penentuan Issue Strategis dan Penentuan Skor Nilai Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Tupoksi Balitbangnovda sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana dan Koordinator Kegiatan Litbang dan Inovasi multi sektor di Sumatera Selatan					5		100
2	Motivasi Pengawai untuk meningkatkan Kinerja						6	120
3	Kerjasama dengan lintas sektoral; Perguruan Tinggi, LPK, LPNK				4			40
4	Sarana dan Prasarana Pendukung Inovasi (Inkubator Teknologi dan Bisnis, Sentra HKI, BIC, Website)						6	120
5	Program Kerja Desa Inovasi untuk meningkatkan income masyarakat (Roadmap dan Masterplan SIDA Sumsel yang mendukung pelaksanaan kegiatan litbang dan Inovasi)			3				60
6	Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangda					5		100
7	Kuantitas dan Skill Peneliti						6	120
8	SOP Penunjang Inovasi untuk Inkubator Teknologi dan Bisnis, dan pasca					5		100

	Inovasi						
9	Kepatuhan Pelaksanaan SOP yang ada				4		80
10	Database Profil (CV) Khusus Peneliti yang ada di Sumatera Selatan					5	100
11	Peraturan Bersama Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menristek Nomor:36 Tahun 2012 (Penguatan Fungsi Balitbangnovda sebagai koordinator dalam Sistem Inovasi Daerah)					5	50
12	Roadmap SIDA				4		40
13	Permendagri Nomor: 20 tahun 2011 tentang Pembentukan BPP di Kabupaten/ Kota			3			30
14	Perpres Nomor: 132 Tahun 2011 tentang MP3EI dengan Strategi Mendukung Sistem Inovasi.					6	60
15	Sumber Daya Alam yang mendukung					5	50
16	Motivasi dan Minat Skill Peneliti (SDM)					5	100
17	Sinergi ABG (Akademisi,					6	120

	Bisnis dan Government)							
18	STP yang ada di Sumatera Selatan				4			40
19	Kebijakan Berbasis Hasil Riset (Belum Semua)			3				30

Keterangan : Total skor = Nilai Skala (1-5) dikalikan bobot

Dari 20 Isu strategis hasil identifikasi SWOT, terpilih 8 isu strategis yang akan dilakukan skoring;

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kerjasama dengan lintas sektoral; Perguruan Tinggi, LPK, LPNK					5		100
2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Inovasi (Inkubator Teknologi dan Bisnis, Sentra HKI, BIC, Website)						6	60
3.	Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangnovda					5		100
4.	Kepatuhan Pelaksanaan SOP yang ada				4			80
5.	Peraturan Bersama Mendagri Nomor: 03 Tahun						6	120

	2012 dan Menristek Nomor:36 Tahun 2012 (Penguatan Fungsi Balitbangnovda sebagai koordinator dalam Sistem Inovasi Daerah)							
6.	Sinergi ABG (Akademisi, Bisnis dan Government)						6	120
7.	Kebijakan Berbasis Hasil Riset (Belum Semua)			3				30